

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI



Nama : Nurbaiti
NIM : 222015049

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

**Diajukan untuk menyusun skripsi
Pada program strata Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Nurbaiti
NIM : 222015049**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbaiti
NIM : 222015049
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi
Pemerintah (Survei Pada OPD Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan ini.

Palembang, 2019



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
Nama : Nurbaiti
Nim : 222015049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing I,

Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

Welly, S.E., MSi
NIDN/NBM: 0212128102/1085002

Mengetahui,

Dekan

u.b. ketua Program Studi Akuntansi



Betty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

“satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini, majulah dengan keyakinan dan tekad yang kuat”

(Nurbaiti)

Terucap syukur kepada Allah SWT Skripsi ini

Kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku tercinta*
- * Kedua adikku Tersayang*
- * Keluarga Besarku*
- * Almamater Hijauku*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survai pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah maka pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah dapat diterima karena adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sehingga kinerja instansi pemerintah akan lebih berkualitas, semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah di suatu organisasi maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah. Dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Intansi Pemerintah, maka

pengaruh komitmen organisasi terhadap instansi pemerintah dapat diterima, karena semakin tinggi komitmen organisasi berupa komitmen efektif, komitmen normative dan komitmen berkelanjutan maka kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bapakku Khoirul Anam dan Ibuku Er Yani yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan motivasi, adik-adikku Doni Andrian dan Yudhi Aditia dan seluruh keluarga besarku serta saudara seperjuangan yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan inspirasi dan dukungan agar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Welly., SE.,M,Si. yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Bapak Mizan, SE.,M.Si.,AK.,CA selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua Teman-Teman Angkatan 2015
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 2019

Penulis

Nurbaiti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN,	
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	13
2. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14
3. Pengertian Komitmen Organisasi	23

4.	Pengukuran Komitmen Organisasi.....	24
5.	Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
6.	Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.....	26
B.	Teori Kerangka Pemikiran	31
C.	Hipotesis.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	39
B.	Lokasi Penelitian.....	39
C.	Operasionalisasi Variabel.....	40
D.	Populasi Penelitian	42
E.	Data yang Diperlukan	44
F.	Teknik Pengumpulan Data	44
G.	Pengujian Data dan Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	
1.	Profil OPD Provinsi Sumatera Selatan	54
2.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	56
3.	Hasil Pengujian Data.....	57
4.	Analisis Statistik Deskriptif	63
5.	Analisis Asosiatif	74
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	83

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan95

B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA97

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 IHPS Semester 1 2018	7
Tebel II.1 Penelitian Sebelumnya	35
Table III.1 Operasionalisasi Variabel	40
Table III.2 Daftar OPD Provinsi Sumatera Selatan	36
Tabel IV.1 Profil Responden.....	55
Tabel IV.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas	58
Tabel IV.6 Hasil Uji Reabilitas	61
Tabel IV.9 Frekuensi Variabel	64
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Responden	66
Tabel IV.25 Hasil Uji Autokorelasi.....	76
Tabel IV.26 Hasil Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel IV.27 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	78
Tabel IV.28 Hasil Uji Koefisien Determinasi	79
Tabel IV.29 Hasil Uji F	80
Tabel IV.30 Hasil Uji T	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot	75
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 2 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
- Lampiran 3 Sertifikat Tofel
- Lampiran 4 Biodata Penulis
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 6 Kuesioner Penelitian

ABSTRAK

Nurbaiti/222015049/2019/Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah survei pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Metode analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan teknik analisis deskriptif dan asosiatif dengan bantuan program *Statistical Program Special Science (SPSS)*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah,. Secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi, Kinerja Instansi Pemerintah.

Abstract

Nurbaiti / 222015049/2019 /The Influence of Government Internal Control System (SPIP) and Organizational Commitment on Government Institutional Performance Survey of Regional Device Organization of South Sumatra.

This research was conducted to answer the existing problem; how much the influence of government internal control system (SPIP) and organizational commitment on government institutional performance survey of Regional Device Organization of South Sumatra. The objective of this study was to find out the influence of government internal control system (SPIP) and organizational commitment on government institutional performance survey of Regional Device Organization of South Sumatra. This study was associative and descriptive research. The data used in this study was primary data and secondary data. The data collection technique was questionnaire. The analytical method and data analysis technique used in this study were descriptive and associative analysis methods and analysis techniques by the help of the Special Science Statistics Program (SPSS). The results of the analysis showed that partially the government internal control system gave an influence government institutional performance. Commitment organization gave an influence of on government performance.

Keywords: Government Internal Control System, Organizational Commitment, Government Performance.

PENGESAHAN

NO. 553 / Abstract / B U M P VIII / 2015

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2016: 81).

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Chabib, 2013: 3). Menurut Rachmat (2010: 316) kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk penilaian asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah

pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Menurut Romney dan John Steinbart (2017: 198) kinerja instansi pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk mencapai tujuan seperti perlindungan aset, menyimpan catatan secara terperinci, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Kinerja Instansi Pemerintah berhasil atau tidaknya akan dipengaruhi oleh tingkat komitmen, baik komitmen dari organisasi atau perusahaan terhadap karyawan maupun antara karyawan terhadap organisasi serta perusahaan sangat diperlukan melalui komitmen yang telah ditetapkan dan akan tercipta iklim kerja yang profesional. Sehingga semakin tinggi komitmen seseorang terhadap tugasnya maka akan semakin tinggi kinerja yang akan dihasilkan, yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin tinggi menurut Aris dan Ghozali (2006: 193).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan menciptakan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Yuhanis Ladewi, 2017: 39). Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas suatu sistem informasi akuntansi yaitu struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab bagian secara tegas, pembagian tanggung jawab bagian dalam organisasi, sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Yuhanis Ladewi, 2017: 41-42).

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pengendalian intern yang dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian dan informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern harusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian intern yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang dilaksanakan, penetapan prosedur dan rewiuw pada seluruh tahapan pembangunan.

Menurut Nancy dkk (2015: 134) telah mengidentifikasi dan mengembangkan ukuran untuk jenis komitmen terdiri dari komitmen afektif yaitu keterkaitan emosional individu terhadap organisasi dan keyakinan pada nilai-

nilainya, komitmen normatif yaitu kewajiban seseorang individu merasa bertanggung jawab dengan organisasi karena alasan moral atau etika, dan komitmen berkelanjutan yaitu nilai ekonomi yang dirasakan seseorang yang tersisa dengan organisasi. Seorang karyawan dapat berkomitmen kepada majikan karena dibayar dengan baik dan merasa akan menyakiti keluarganya untuk berhenti bekerja.

Menurut Griffin dan Gregory (2013: 497) komitmen organisasi adalah identifikasi dan keterkaitan seseorang dengan suatu organisasi. Komitmen organisasi yang kuat dicirikan oleh dukungan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk mengerahkan banyak usaha atas nama organisasi dan keinginan untuk tetap bersama organisasi (Donan Slocum Jr. (2011: 91).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal kementerian/lembaga dalam pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan atas LKKL tersebut mengungkapkan setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. BPK menemukan 11 masalah terkait kelemahan sistem pengendalian dalam pemeriksaan laporan keuangan (Agung Firman Sampurna, 2017).

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2017 memperoleh hasil sangat tidak memuaskan. Rendahnya nilai kematangan maturitas ini disebabkan tidak terdokumentasinya setiap kegiatan. Tidak adanya dokumentasi menjadi masalah tersendiri ketika melakukan kegiatan pemeriksaan ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Buruknya penilaian yang

diperoleh ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan waktu sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan (Siti Rosida, 2017).

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dinilai masih perlu ditingkatkan. Mengingat kematangan SPIP OPD dinilai masih berada di level 3 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Banten. BPKP Banten mendapati jika OPD tidak mendokumentasi evaluasi penyelenggaraan SPIP. Upaya tersebut dapat terealisasi jika seluruh OPD memiliki komitmen yang kuat pascatahapan evaluasi SPIP dilakukan (Muhammad Masykur, 2019).

Faktor kendala dan hambatan terkait pengelolaan kearsipan di Pemkab Melawi menjadi tidak berkualitas selama ini. Seperti lemahnya komitmen pemimpin, karena tidak menempatkan Dinas Arpusda bagian penting sebagai tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sosialisasi kearsipan di OPD masing-masing dan meningkatkan kesadaran kearsipan juga agar OPD dapat memahami serta memfasilitasi setiap penyusunan arsip (Andri Suparto, 2019).

Rendahnya komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi salah satunya dapat dilihat dari keenganan untuk memecat PNS koruptor. Lambatnya proses pemecatan PNS koruptor menunjukkan minimnya komitmen pemberantasan korupsi dari instansi-instansi yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak karena uangan pajak yang mereka bayarkan justru digunakan oleh negara untuk

membayar gaji PNS yang korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2019). Implementasi kinerja belum maksimal sesuai dengan visi dan misi Gubernur Lampung, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengkhawatirkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lampung menurun dari B tahun 2016 menjadi CC di 2017. Hasil kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum memiliki kejelasan sehingga perlu menjadi perhatian dan kepedulian bersama oleh seluruh OPD (Aris Padila, 2018).

Ketidaknyamanan wakil rakyat atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dianggap tidak maksimal saat ini Laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun 2017 saat ini masih ada program OPD pemerintah kota Palembang yang belum berjalan. Masih banyak OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di dinas masing-masing dan masih banyak OPD tidak paham kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan (Fauzi achmad, 2017).

Saat ini masih ada program pemerintah Kota Palembang yang belum berjalan. Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sampai sekarang program smart city belum berjalan padahal rencana itu sudah ada sejak lama dan sudah masuk dalam anggaran. Selain itu masih banyak OPD yang tidak memahami berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan didinas masing-masing (Fauzi achmad, 2017).

Pemerintah Kota Palembang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2017. Sesuai peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lambatnya penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih ada empat (OPD) yang belum menyerahkan laporannya. Empat OPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) (Harobin, 2018).

Tabel I.1
Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Kelemahan SPI Atas LKPD Tahun 2016-2017

Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Pemerintah Daerah
Kelemahan SPI: Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan,	5		Provinsi Sumatera Selatan
1. Penyimpangan barang pada 4 OPD tidak didukung dengan kartu stok barang sehingga persediaan yang dilaporkan pada akhir tahun hanya sesuai dengan hasil stock opname sisa persediaan yang ada. 2. Rekonsiliasi nilai asset tetap antara bidang asset dan bidang akuntansi badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) tidak dilakukan. 3. Penyertaan modal kepemilikan 100% tidak didukung dengan laporan keuangan sejak tahun 2014-2017			
Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan			

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp 4,40 miliar, dan pekerjaan pembangunan jembatan musu VI kota Palembang senilai Rp 4,12 miliar	2	8,52	Provinsi Sumatera Selatan
Kekurangan volume atas paket pekerjaan fisik, antara lain pada pembangunan dan peningkatan jalan	-	5,07	Provinsi Sumatera Selatan
Kelebihan pembayaran yang terjadi pada pemkot ogan ilir, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembutan trotoar jalan nasional dalam indralaya karena kekurangan volume dan pemahalan harga satuan kontrak addendum senilai Rp 1,85 miliar. 2. Pekerjaan urugan tanah untuk pembangunan taman kota dan Dinas PKP senilai Rp 1,18 miliar. 3. Pekerjaan rehap jalan pada Dinas PUPR dan revitalisasi pasar indralaya pada Dinas PKP senilai Rp 402,37 juta 			

Sumber; Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, 2018

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) dengan judul “Pengaruh Good Governace dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Palalawan” berdasarkan hasil maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola dan control internal memiliki positif dan signifikansi berpengaruh pada kinerja pemerintah dikabupaten Pelalawan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Noval Hadi Praja (2015) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru” berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh komitmen organisasi, pengaruh sistem control internal pemerintah dan peran manajer keuangan dari kinerja manajerial memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektifitas manajerial kinerja.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lidia Hasnani (2016) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi membawa kinerja yang signifikan pada local pemerintah dengan koefisien regresi 0,231 dan nilai signifikan 0.042 (alpha 0.05), pengawasan fungsional membawa kinerja yang signifikan dari pemerintah daerah dengan koefisien regresi 0,202 dan nilai signifikan 0.026 (alpha 0,05). Sistem pengendalian intern pemerintah membawa kinerja yang signifikan pada lokal pemerintah dengan koefisien regresi 0,131 dan nilai signifikan 0,041 (alpha 0,05).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yuhanis Ladewi dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi” . berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi dan kualitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Jannah Abdi Aziz (2018) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah” berdasarkan hasil maka dapat disimpulkan bahwa variable sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparaturn pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei pada OPD Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Seberapa besar Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Secara Bersama-sama Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk Mengetahui Secara Bersama-sama besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang telah diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya.

2. Bagi OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Memberikan sumbangan referensi bagi OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan kebijakan mengenai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian mahasiswa dosen untuk penulisan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Firman Sampurna, 2018. *BPK Soroti Lemahnya Sistem Pengendalian Internal Kementrian/Lembaga*. Antaranews, Jakarta. <https://m.antaranews.com/berita/631918/bpk-soroti-lemahnya-sistem-pengendalian-internal-kementrianlembaga>
- Andry Suparto, 2019. *Masih Banyak OPD Belum Memahami Pengelolaan Kearsipan*. Melawinews.com, Melawi. <https://melawinews.com/2019/03/25/andri-suparto-masih-banyak-opd-lum-memahami-pengelolaan-kearsipan/>
- Anwar Sanusi, 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Selemba Empat.
- Aris Padila, 2018. *Anggap Kinerja OPD Belum Maksimal, Biro Organisasi Khawatirkan Nilai SAKIP Pemprov 2017 Anjlok*. Kupastuntas.com. Bandar Lampung. <https://www.kupastuntas.co/2018/08/29/anggap-kinerja-opd-belum-maksimal-biro-organisasi-khawatirkan-nilai-sakip-pemprov-2017-anjlok/>
- Colquitt et al, 2015. *Organizational Behavior*. Fourth Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Don, H. dan J.W. Slocum Jr., 2011. *Organizational Behavior*. Thirteenth Edition. USA: Cengage Learning.
- Fauzi Achmad, 2017. *Kinerja OPD Pemkot Palembang di Anggap Tidak Maksimal*. Palembangbaru.com. Palembang. <http://palembangbaru.com/kinerja-opd-pemkot-palembang-dianggap-tidak-maksimal/>
- George H. Bodnar dan William S. Hoppwood, 2013. *Accounting Informasi Sistem*. Eleventh Edition. Florida Atlantic: Pearson.
- Griffin R. W dan M. Gregory, 2013. *Organizational Behavior*. Eleventh Edition. USA: Cengage Learning.
- Harobin Mustofa, 2018. *BPK Deadline Laporan Keuangan Pemkot Palembang*. Beritapagi.com. Palembang. <http://beritapagi.co.id/2018/01/22/bpk-deadline-laporan-keuangan-pemkot-palembang.html>
- Indonesia Corruption Watch, 2019. *Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Rendah*. Antikorupsi.org. Jakarta. <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/komitmen-pemberantasan-korupsi-pemerintah-daerah>

- Lidia Hasnani, 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi Pengawasan Fungsional Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Jom Fekon. Vol. 3, No. 1 Februari 2016
- Luthans Fred, 2011. *Organizational Behavior*. Twelfth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Mahsun Mohamad, 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2017. *Accounting Informasi Systems*. Fourteenth Edition. Arizona State: Pearson.
- McShane S.L. dan Glinow M.A.V., 2008. *Organizational Behavior*. Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Muhammad Masykur, 2019. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemkot Cilegon Level 3*. Kabaranten.com, Banten. <https://www.kabar-banten.com/sistem-pengendalian-intern-pemerintah-pemkot-cilegon-level-3/>
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Selemba Empat.
- Nancy L., Robbins S.P dan A.J. Timothy, 2015. *Organizational Behavior, Concept, Controversies, Applications*, Seventh Edition. Canada: Pearson.
- Noval Hadi Praja, 2015. *Pengaruh Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal Fekom Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
- Nur Azlina dan Ira Amelia, 2014. *Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12, No. 2 Desember 2014
- Nur Jannah Abdi Aziz, Umi Pratiwi dan Eko Suyono, 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Vol. 20, No. 04 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Siti Rosida, 2017. *Pengendalian Internal Masih Buruk*. Jabarekspress.com, Jakarta. <http://jabarekspres.com/2017/pengendalian-internal-masih-buruk/amp/>

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uma Sekaran, 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat.

Yuhanis Ladewi, 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Teori dan Praktek)*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.